

Abaikan Izin Presiden

Agar Kasus Bansos Kalbar Tak Stagnan

PONTIANAK—Polda Kalbar dinilai perlu mengambil langkah lanjutan dalam menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalbar. Langkah itu dengan mengabaikan turunnya surat izin Presiden agar kasusnya tidak stagnan.

“Pemeriksaan terhadap legislator bisa dilakukan apabila izin Presiden tidak ada

dalam waktu 30 hari sebagaimana ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” kata Direktur LPS-AIR Deman Huri di Pontianak, kemarin.

Menurut dia, kini juga telah turun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 9/2009 tentang petunjuk izin Presiden dalam penyidikan kasus dugaan korupsi. Dengan adanya SEMA tersebut kini penyidik bisa meneruskan penyidikan kasus dugaan korupsi menyangkut pejabat negara

jika izin presiden tidak turun setelah 60 hari pengajuan.

Demam menambahkan dalam menangani kasus bansos, aparat perlu mengambil langkah cepat. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan butuh penanganan cepat. Sehingga pengusutan bisa terus dilakukan. Termasuk untuk memeriksa dua saksi yang berstatus pejabat negara.

Sementara Polda tetap menunggu izin Presiden untuk mengambil keterangan dua saksi yang berstatus pejabat negara dan menyatakan

penanganan kasus bansos tetap terus berjalan.

“Kita masih menunggu surat izin Presiden. Memang masih ada dua saksi yang belum diperiksa. Berinisial U dan Z. Keduanya sekarang sedang menjabat sebagai anggota DPR-RI,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Komisaris Besar Bambang Priyambada di Pontianak, kemarin. Dia menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Mabes Polri dalam mengusut kasus bansos. Kasus tersebut juga

telah dilakukan gelar perkara di Mabes Polri.

Penanganan kasus dugaan korupsi dana bansos sudah cukup lama berlangsung. Kali pertama ditangani Poltabes Pontianak pada September 2009. Kemudian diambil alih Polda Kalbar tertanggal 30 Desember. Dan, 14 Januari 2010, BPK yang menemukan ada indikasi penyimpangan dana Rp22,14 dalam kasus Bansos KONI menyerahkan hasil auditnya ke KPK, sebelum ditangani kembali Polda Kalbar. (stm)